



## DPRD Sanggau Bahas Perubahan APBD 2024

**SANGGAU, SP** - Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diajukan eksekutif dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan ke-3 DPRD Kabupaten Sanggau, Senin (2/9). Ada beberapa prioritas anggaran yang perlu disesuaikan, termasuk alokasi dana untuk sektor kesehatan, pendidi-

kan, dan infrastruktur.

Penjelasan mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Libertus Toto Martono SSos MSI mewakili Pj Bupati Sanggau.

Wakil Ketua I DPRD Sanggau, Timitios Yance mengatakan, rapat pari-

purna tersebut membahas berbagai perubahan alokasi anggaran yang dianggap perlu untuk mengoptimalkan penggunaan dana daerah.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 membahas empat hal, dimana masing-masing Fraksi di DPRD Sanggau menyampaikan pandangan umum (PU).

“Dalam penjelasannya, Pj Sekda Kabupaten Sanggau menyampaikan beberapa prioritas anggaran yang perlu disesuaikan, termasuk alokasi dana untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kami menekankan, pent-

ingnya penyesuaian ini agar program-program yang direncanakan bisa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Yance, usai rapat paripurna.

Yance menyebutkan, agenda pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 masih pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahap II yang sudah ditandatangani bersama, dan akan dilanjutkan dengan penetapan perubahan.

“Saya mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan dengan efisien, dan sesuai dengan



**Kami menekankan, pentingnya penyesuaian ini agar program-program yang direncanakan bisa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”**

**Timitios Yance**

Wakil Ketua DPRD Sanggau

rencana yang telah disepakati,” tegasnya.

Yance berharap proses pembahasan ini dapat menghasilkan Perubahan

APBD 2024 yang tepat, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sanggau.

“Semua perubahan ha-

rus berdasarkan kebutuhan nyata dan mendesak dari masyarakat, serta pertimbangan kondisi ekonomi saat ini,” pungkasnya. **(dit)**